

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jember adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukota Kabupaten Jember adalah Kota Jember yang terletak di tengah-tengah wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan dimana 28 kecamatan terdiri dari 226 desa dan 3 kecamatan terdiri dari 22 kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember nomor 188 tahun 2022 tentang Penetapan Jaringan Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di wilayah Kabupaten Jember terdapat 16 trayek angkutan perkotaan dan 3 trayek angkutan pedesaan. Namun pada kondisi eksisting, hanya 9 trayek yang masih aktif yaitu 6 trayek angkutana perkotaan dan 3 trayek angkutan pedesaan. Angkutan perkotaan trayek A melayani zona 1 (Patrang, Kaliwates), zona 3(Sukorambi, Kaliwates) dan zona 6 (Patrang, Pakusari). Trayek B melayani zona 1(Patrang, Sempusari dan Kaliwates), zona zona 3 (Sukorambi, Kaliwates) dan zona 6 (Patrang, Arjasa). Trayek C melayani zona 1(Patrang, Kaliwates) dan zona 3 (Sukorambi, Kaliwates). Trayek D melayani zona 1 (Patrang, Kaliwates, Pakusari), zona 2 (Sumbersari, Kaliwates) dan zona 3 (Sukorambi, Kaliwates). Trayek E melayani zona 1 (Patrang, Kaliwates), zona 2 (Sumbersari, Kaliwates), zona 3 (Sukorambi, Kaliwates) dan zona 6 (Patrang, Mayang, Sumbersari, Pakusari). Trayek G melayani Zona zona 1 (Patrang, Kaliwates), zona 2 (Sumbersari, Kaliwates) dan zona 3 (Sukorambi, Kaliwates, Ajung). Angkutan Pedesaan trayek Tanggul melayani zona 9 (Rambipuji dan Bangsalsari) dan zona 18 (Semboro,Tanggul). Trayek Puger melayani zona 8 (Rambipuji, Jenggawah, Rambipuji dan Ajung), zona 9 (Rambipuji dan Bangsalsari), zona 17 (Balung

dan Umbulsari), zona 21 (Gumukmas dan Puger) dan zona 23 (Puger, Gumukmas dan Kencong).

Selain dari sisi kinerja operasional fasilitas sarana tempat pemberhentian angkutan umum juga perlu diperhatikan karena berdasarkan aturan dalam PM 15 Tahun 2019 pasal 30 pasal 1 menyatakan bahwa rencana umum jaringan trayek perkotaan dan wilayah dilengkapi dengan (b) tempat persinggahan trayek dan pada pasal (3) tempat persinggahan yang dimaksud berupa halte atau rambu pemberhentian angkutan umum yang dilalui oleh setiap trayek. Selain dari segi pelayanan, fasilitas angkutan umum juga harus diperhatikan sebagai pendukung angkutan umum. Salah satunya prasarana yang harus diperhatikan adalah halte. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 271 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum, halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum yang dilengkapi dengan bangunan, dan juga dapat dilihat sebagai kantung-kantung penumpang atau permintaan penumpang terhadap angkutan umum. Peran halte sebagai prasarana sangat penting dalam menunjang angkutan umum perkotaan maupun pedesaan.

Dari hasil inventarisasi Tim PKL Kabupaten Jember Tahun 2023, pada Kabupaten Jember sendiri memiliki 21 halte dari 6 trayek angkutan perkotaan yang masih aktif. Kondisi halte yang ada di Kabupaten Jember masih belum memenuhi SPM Halte berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012. Ditemukannya halte yang tidak aktif karena mengalami peralihan fungsi menjadi tempat berjualan dan tempat parkir seperti Halte Cokroaminoto dan Halte Gajah Mada. Serta naik turun penumpang disembarang tempat karena tidak memiliki TPAU terdekat dengan kantong penumpang.

Trayek D merupakan trayek yang memiliki panjang lintasan sejauh 19 km dengan rute dari terminal Tawang Alun menuju Terminal Pakusari. Trayek D melintasi beberapa zona yaitu dimulai zona 3 (Desa Ajung, Desa

Jubung, Kelurahan Mangli, Kelurahan Sempusari, Kelurahan Kaliwates) – zona 1 (*Central Business Districk*) – zona 2 (Kelurahan Sumbersari, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Tegalbesar, Kelurahan Kranjingan). Trayek D memiliki panjang lintasan 19 km yang terdiri dari 16 halte dimana 2 halte telah mengalami perubahan fungsi yaitu halte Cokroaminoto yang beralihfungsi menjadi tempat parkir oleh warga sekitar dan halte Gajah Mada yang menjadi tempat berjualan oleh warga. Selain itu kondisi dari 14 halte dengan rata rata kondisi prasarana setiap halte adalah 45% dan tingkat kelengkapan halte sesuai PM 10 Tahun 2012 adalah 47%. Trayek D memiliki tata guna lahan berupa kawasan pemukiman, *Central Business Districk*, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan Pertokoan serta kawasan pendidikan. Berdasarkan permasalahan yang ada dilapangan diketahui ketersediaan fasilitas halte atau titik halte yang tidak sesuai dari lokasi kantong penumpang selain dari sisi kinerja operasional angkutan umum tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan kajian kebutuhan halte angkutan umum. Oleh karena itu, perlu dilakukannya evaluasi fasilitas angkutan umum yang ada untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Dari hasil identifikasi permasalahan ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan titik lokasi TPAU yang ada di Kabupaten Jember.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulisan kertas kerja wajib ini Berjudul **“KAJIAN KEBUTUHAN TPAU (TEMPAT PEMBERHENTIAN ANGKUTAN UMUM) ANGKUTAN PERKOTAAN TRAYEK D DI KABUPATEN JEMBER”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Menurut aturan PM 15 Tahun 2019 pasal 30 pasal 1 menyatakan bahwa rencana umum jaringan trayek perkotaan dan wilayah kota dilengkapi dengan (b) tempat persinggahan trayek dan pada pasal (3) dijelaskan tempat persinggahan yang dimaksud berupa halte atau rambu pemberhentian angkutan umum yang dilalui oleh setiap trayek.
2. Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum dengan bukti *load factor* rata-rata pada Trayek D sebesar 18%.
3. Pada trayek D 2 dari 16 halte sudah mengalami perubahan fungsi seperti halte Cokroaminoto yang beralih fungsi menjadi tempat parkir dan halte Gajah Mada yang mengalami perubahan fungsi menjadi tempat berjualan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi fasilitas halte Trayek D saat ini?
2. Bagaimana usulan kebutuhan halte untuk Trayek D?
3. Bagaimana desain halte yang sesuai dengan SPM?

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah untuk melakukan evaluasi halte Angkutan Perkotaan Trayek D yang ada di Kabupaten Jember serta memberikan rekomendasi titik halte yang sesuai guna mengoptimalkan fungsi halte pada trayek D yang ada di Kabupaten Jember. Sedangkan tujuan dari penyusunan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fasilitas halte Trayek D saat ini
2. Menganalisis usulan kebutuhan halte untuk Trayek D
3. Membuat desain usulan halte sesuai SPM

1.5 Batasan Masalah

Untuk memberikan batasan masalah terhadap penelitian yang dilakukan karena keterbatasan waktu dan tenaga yang ada maka dalam penelitian ini perlu adanya batasan-batasan masalah supaya memberikan arah yang jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini, penulisan dibatasi pada:

1. Evaluasi halte hanya pada satu trayek yaitu Trayek D di kabupaten Jember.
2. Melakukan analisa kebutuhan halte dan evaluasi fasilitas halte kondisi saat ini yang sesuai dengan pedoman teknis.
3. Memberikan usulan titik lokasi halte.
4. Membuat desain usulan halte sesuai SPM.